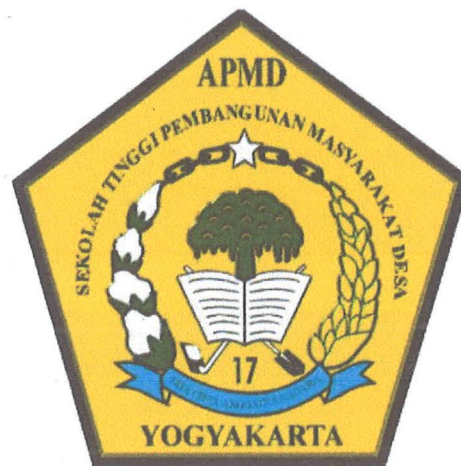


**PENDAMPINGAN PEMERINTAH DESA OLEH LEMBAGA STRATEGI
NASIONAL SEBAGAI LSM DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA**
*(Penelitian Deskriptif-Kualitatif Governance di Kalurahan Kampung, Kapanewon
Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI



Disusun Oleh :

NURSAMSIYAH

NIM : 18520185

**PROGRAM STUDI ILMU PEMRINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022



**PENDAMPINGAN PEMERINTAH DESA OLEH LEMBAGA STRATEGI
NASIONAL SEBAGAI LSM DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA**
*(Penelitian Deskriptif-Kualitatif Governance di Kalurahan Kampung, Kapanewon
Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pendidikan

APMD

Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

NURSAMSIYAH

NIM: 18520185

YOGYAKARTA



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU(S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

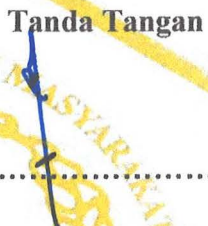


YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Januari 2022
Waktu : 10.00-11.15 WIB
Tempat : Ruang Ujian STPMD”APMD” Yogyakarta

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.</u> Penguji Samping I	
3. <u>Utami Sulistiana, S.P.,M.P</u> Penguji Samping II	



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A


HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursamsiyah
NIM : 18520185
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul Pendampingan Pemerintah Desa Oleh Lembaga Strategi Nasional Sebagai LSM dalam Pengembangan Desa Wisata, Penelitian Kualitatif Deskriptif di Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah di sebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Februari 2022

Peneliti,

Nursamsiyah
18520185



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh ummat di dunia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat rahmat dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana setrata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P., MP. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran dengan penuh ketelitian dan kesabaran kepada peneliti sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Suharyanto M.M selaku Dosen Wali yang telah membantu, memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.

7. Pemerintah Kalurahan Kampung, Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat Kalurahan Kampung yang telah memberikan tempat dan waktu untuk peneliti melaksanakan penelitian.
8. Direktur Lembaga Strategi Nasional dan seluruh jajarannya yang telah memberikan ruang belajar dan menulis skripsi.

Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Peneliti,



Nursamsiyah
NIM.18520185

MOTTO

طَفَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Jika kamu sudah berazzam/bertekad bulat, maka bertawakkallah pada Allah.”

(QS. 3: 159)

Tujuan dari pendidikan adalah untuk mengajar kita cara berpikir daripada memikirkan apa yang orang lain pikirkan (Bill Beattie).

“Keinginanmu mesti lebih besar daripada ketakutanmu akan kegagalan, karena sejatinya yang salah akan tetap kalah”

(Nursamsiyah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Bapak Minoto dan (Almh) Ibu Sumitah tercinta yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan atas keberhasilan saya. Berkat do'a restu, dukungan moril dan materil merekalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakakku ; Herwanto, Prehatin, Giyanti dan Pipit Egha Wati yang selalu memberikan dukungan motivasi, semangat dan materil bagi keberhasilan saya selama studi serta seluruh keluarga besar Marto Jasemen yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
3. Dr. H. Jarot Winarno, M. Med. Ph selaku Bupati Kabupatn Sintang yang telah memberikan dukungan materil serta memotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kembali ke tanah senentang.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
5. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 terima kasih atas dinamika dan dialektika yang membangun selama perkuliahan dan untuk Bruno Rey terima kasih telah menemani, membantu dan memberikan semangat, kesabaran dengan cinta kasih untuk saya.
7. Kepada keluarga besar UKMI STPMD"APMD" Yogyakarta yang memberikan ilmu dan pengalaman bagi saya.

8. Kepada keluarga besar GMNI Yogyakarta, terlebih khusus Komisariat GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta terima kasih bung dan sarinah serta alumni yang telah mengajarkan saya untuk mengembangkan pemikiran dengan merdeka, belajar kritis dan menghargai setiap pandangan yang ada, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Merdekaa...
9. Kepada Direktur Lembaga Strategi Nasional yang telah memberikan saya ruang untuk belajar dan berdesa serta menambah pengetahuan dan pengalaman merdesa serta relasi bagi saya.
10. Kepada *bestieku* Susan yang selalu menemani, dan membantuku dalam penyusunan skripsi.
11. Dan karya sederhana ini penulis persembahkan untuk segenap sahabat, teman dan adik-adik seperjuangan yang bertanya “Kapan sidang ?” ; Vidia Andina, Prisila Widy Silalahi, Triana Anggerina, Ega Destrina, Anantasiah Wanti, Putri Pebrianti, Anisa Nur Hayati, Vinore Bitu Meja, Qurnia Fatimah, Aminah, Susana Sinar, Resa, M. Fais, Bung J, Handono, Aziz, Boming, M. Ishak, Reni, Felix Nola, Jhon, Bello, Roy, Feri, Wawan, Enu Wulan, Angel, Soviana, Imam, Kontes, Indra, Erwin, Inayah, Hengki, Bung Ikar, Bung Ivan, Kak Verlin, Bung Ochi, Bung Adio, Bung Taufik, Bung Ama, Rika, Tika, Rinus, Litan, Lala, Adio, Bung Taufik dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

ABSTRACT

Village Development Becomes key and foundation development regional and national. village tour is village that has power pull alone for bring tourists, so could Upgrade prosperity its people. Purpose study this for analyze effort Government Inner Village Village develop village travel experience _ upheaval in shape inequality perception build draft village travel. Use method study qualitative, data collection is done with way 1). Observation, 2). Interview, and 3). Documentation, 4. Triangulation. Determination informant done with method purposive, consisting of from Government Village, companion village, cadre empowerment Public village, Representative Body Village, group society and society. Data analysis with data reduction, *data display*, *verification* and investigation. Location Research in Kampung Kalurahan, Kapanewon Ngawen, Gunungkidul.

Research results this show implementation companion village in development village tourism in the Kampung Kalurahan, produce a number of *change*. Existence progress in Case enhancement capacity government Inner Village Village do planning based on potency village. With open *entry point* for Village Headquarters via Kali Waru Tourism *Rest Area*. Compile village village Inline RPJMDes with potency village. do empowerment Public through groups community, such as training and coaching towards farmers, MSME businesses, and pokdarwis in the Village Headquarters, as well as weave cooperation with other party in skeleton development village.

Keywords : *Governance*, companion Village , Development village Tour

INTISARI

Pembangunan Desa menjadi kunci dan fondasi pembangunan daerah dan nasional. Desa wisata merupakan desa yang memiliki daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya Pemerintah Kalurahan Kampung dalam mengembangkan desa wisata yang mengalami pergolakan dalam bentuk ketidaksamaan persepsi membangun konsep desa wisata. Menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara 1). Observasi, 2). Wawancara, dan 3). Dokumentasi 4. Triangulasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposif, yang terdiri dari Pemerintah Desa, pendamping desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa, kelompok masyarakat dan masyarakat. Analisis data dengan reduksi data, *data display*, *verification* dan investigasi. Lokasi Penelitian di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Gunungkidul.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Pendamping Desa dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Kampung, menghasilkan beberapa perubahan. Adanya kemajuan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintah Kalurahan Kampung dalam melakukan perencanaan berdasarkan potensi desa. Dengan membuka *point entry* bagi Kalurahan Kampung melalui *Rest Area* Wisata Kali Waru. Menyusun Perdes RPJMDes yang inline dengan potensi desa. melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat, seperti pelatihan dan pembinaan terhadap para tani, usaha UMKM, dan pokdarwis yang ada di Kalurahan Kampung, serta menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembangunan desa.

Kata kunci : Governance, Pendamping Desa, Pengembangan Desa Wisata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka, arah dari kebijakan pembangunan pemerintah kini lebih memperhatikan pembangunan yang mengarah pada desa. Dalam konteks ini pemerintah mengubah arah pendekatan terhadap desa yang sebelumnya melalui pendekatan kontrol dan mobilisasi kini berubah menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Menjadikan masyarakat desa dan Pemerintah Desa sebagai satu kesatuan *self-governing community* diberdayakan untuk mampu hadir sebagai *actor* dalam rumahnya sendiri dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Hal ini merupakan angin segar bagi desa, desa diberikan kekuatan baru untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri, yang dibuktikan dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam Undang-undang tersebut merupakan dengan tujuan untuk menguatkan semangat desa berinovasi. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Artinya desa-desa didorong untuk menjadi subjek penggerak dalam pembangunan dari pinggiran, ini merupakan suatu usaha merealisasikan salah satu dari agenda strategis prioritas pemerintahan yang selalu digaungkan yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” yang merupakan salah satu dari misi dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Pembangunan yang dilakukan dengan pengembangan potensi sumber daya melalui perubahan, pertumbuhan, dan peningkatan sosial, ekonomi, politik, budaya, moral, lingkungan, dan aspek terkait lainnya sesuai dengan yang diinginkan, sebagai upaya untuk memajukan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Dalam Peraturan Kementerian Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang adanya Pendamping Desa bertujuan membantu aparat desa dalam membangun masyarakat desa yang lebih maju dan mandiri, bertugas mengawal pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menciptakan proses pembangunan yang partisipatif serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Dalam melakukan pembangunan, tentu Desa memiliki berbagai macam agenda baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaan. Dari beberapa agenda besar tersebut tentu dikelola oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Desa yang mengalami keterbatasan dalam melaksanakan agenda-agendanya, diberikan kemudahan dalam hal pendampingan desa, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adanya pendampingan desa, kemudian dituangkan dalam Peraturan Kementrian Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan yang dilakukan secara berlanjut untuk memberdayakan desa sebagai *self-governing community* dan memperkuat desa, yang merupakan modal penting dalam mengawal perubahan desa. (Peraturan Menteri Desa, 2015)

Kegiatan Pendampingan desa yang dilakukan mulai dari membantu meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan

pembangunan Desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris serta tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

Dalam Peraturan Kementrian Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, yang dimaksud sebagai pendamping adalah; Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) terdiri dari: a. Lembaga Swadaya Masyarakat; b. Perguruan Tinggi; c. Organisasi Kemasyarakatan; atau d. Perusahaan. (Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa) Kebijakan tersebut harapannya mampu memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (Peraturan Menteri Desa, 2015)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah salah satu dari pendamping desa yang disebutkan dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga non pemerintahan yang memiliki peranan sebagai jembatan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga lembaga ini memiliki peranan yang kuat sebagai kekuatan politik Indonesia dengan melakukan pengawasan sehingga dapat melakukan *controlling* dan *monitoring* terhadap segala kegiatan pemerintah dan berhak melakukan kritik atau protes apabila hal yang dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku dengan tujuan masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi pendamping desa adalah Lembaga Strategi Nasional. Terkait hal ini konsep kemitraan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Strategi Nasional adalah kerja sama dalam pengembangan desa wisata yang dilaksanakan sesuai dengan potensi setempat, maka dilakukan pembangunan yang tepat bagi masyarakat berdasarkan potensi wilayah. Lembaga Strategi Nasional sebelumnya telah melakukan beberapa pendampingan sebelum mendampingi Kalurahan Kampung. Pendampingan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa yang diikuti oleh Kepala Desa Temba Lae sebagai ketua forum komunikasi Kepala Desa di Kabupaten Dompu, Kepala Desa Watu Baur Kabupaten Manggarai, Kepala Desa Labuhan Lalar, dan Kepala Kampung Impendi Yendidori Kabupaten Biak Nomfor.

Berdasarkan hasil telaah kondisi riil di lapangan bahwa : Pertama, selama puluhan tahun Kalurahan Kampung belum memiliki satu pun dokumen atau gagasan perencanaan yang berorientasi pada pembangunan desa wisata. Kedua, Kalurahan Kampung memiliki potensi bidang pertanian, peternakan, dan potensi alam yakni Kali Waru, yang merupakan sungai satu-satunya tidak pernah surut jika musim kemarau tiba, kemudian Watu Keren yang merupakan perbukitan. Sedangkan, budaya Kalurahan Kampung memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya adalah budaya nyadranan begitu pula potensi kesenian, kuliner dan lainnya yang dimiliki Kalurahan Kampung.

Oleh karena itu, Peran Lembaga Strategi Nasional dalam proses pengembangan wisata di Kalurahan Kampung adalah sebagai konselor, penyedia jasa dalam hal ini sumbangsih ide pemikiran dan gagasan. Selain itu, untuk

mendukung pendampingan Lembaga Strategi Nasional terhadap Pemerintah Desa dalam mengembangkan wisata tersebut maka perlu respon masyarakat terkait rencana pembangunan wisata tersebut, mulai dari upaya pendampingan, perencanaan pengelolaan wisata, pembacaan potensi strategis desa. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dengan mengundang seluruh perwakilan tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam pembacaan potensi desa dalam forum diskusi.

Karenanya pada prespektif *governance* yang di dalamnya terkandung *point* penting tentang interaksi pemerintah dan non pemerintah, maka persis pada penelitian ini yakni berkaitan dengan Lembaga Strategi Nasional sebagai sebuah LSM yang mendampingi Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan desa wisata. Pendampingan tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Kementerian Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, maka dalam hubungan antara pemerintah dan non pemerintah dalam upaya pengembangan desa wisata di Kalurahan Kampung, perlu direspon secara positif dari masyarakat. Oleh karena itu, tanggapan masyarakat Kalurahan Kampung terkait pendampingan Lembaga Strategi Nasional terhadap pemerintah Kalurahan Kampung adalah menerima dan mendukung Pemerintah Desa atas usaha pengembangan wisata di Kalurahan Kampung sebagai bentuk usaha bagi hajat orang banyak.

Dapat disimpulkan dalam melakukan pembangunan desa membutuhkan partisipasi yang melibatkan pihak lain, masyarakat terbuka dan Pemerintah Desa yang inklusif, yang dapat menerima partisipan dalam mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Desa dalam hal ini memiliki kontribusi untuk

mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan menggali potensi desa dengan tujuan pengembangan dan kemajuan desa. Salah satu potensi desa yang dapat dikembangkan yaitu pariwisata. Pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, berperan aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya daerah.

Dalam konteks percepatan pembangunan desa dan atas kondisi dan potensi desa yang dimiliki dan belum terkelola, maka Pemerintah Desa Kalurahan Kampung melibatkan Lembaga Strategi Nasional dalam merancang pengembangan desa wisatanya. Berdasarkan survei pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Strategi Nasional telah berjalan kurang lebih 1 tahun, salah satu hasilnya yakni tersusunnya dokumen perencanaan terkait pengembangan wisata.

Pendampingan pada proses perencanaan pembangunan sampai pada hasil pembangunan terwujud yang dalam perencanaannya tidak hanya berpusat di *Rest Area* Kali Waru saja, tetapi sampai pada kesiapan manajemen BUM Desa, kesiapan dalam menjemput bola soal potensi pariwisata di Kalurahan Kampung. Lokasi tanah kosong yang akan dijadikan wisata *rest area* di Kali Waru oleh pemerintah akan didirikan sebuah bangunan untuk kantor kepolisian, hal tersebut mengganggu perencanaan wilayah yang akan dikembangkan menjadi wisata.

Selain itu, dalam dinamika pendampingan masih banyak masyarakat yang belum tahu soal fokus pembangunan desa, ketika diputuskan oleh Pemerintah Desa bahwasanya akan mengembangkan memanfaatkan kekosongan tanah/lahan sawah yang akan dikelola menjadi *rest area*. *Rest area* di sini nantinya bukan hanya akan menjadi tempat singgah tetapi tempat wisata yang letaknya di dusun

Kali Waru. Dalam hal ini masyarakat masih banyak yang merasa iri dengan dusun Kali Waru, menurut masyarakat potensi Watu Keren sangat bagus jika dikembangkan.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang pendampingan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Lembaga Strategi Nasional dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Kampung, sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Kementerian Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa, untuk kesejahteraan masyarakat, dalam menyatukan pandangan di internal pemerintah maupun masyarakat desa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penulisan dalam penelitian ini adalah:

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Pendampingan Pemerintah Desa oleh Lembaga Strategi Nasional dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, diantaranya;

1. Pendampingan dalam pemetaan potensi desa
2. Pendampingan dalam penyusunan regulasi desa
3. Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat
4. Pendampingan dalam kerjasama desa dengan pihak lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pendampingan Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh Lembaga Strategi Nasional dalam konteks pengembangan desa wisata ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menjawab teori-teori dan fenomena yang diteliti terkait pendampingan yang dilakukan Lembaga Strategi Nasional dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mendeskripsikan tentang pendampingan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Lembaga Strategi Nasional dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa penelitian memberikan *tools* bagi desa-desa lain dalam melakukan perencanaan yang tepat sesuai dengan potensi desa dalam membangun desa wisata.

b. Manfaat Akademis

Sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian berikutnya yang mengkaji tentang pendampingan desa dalam mengembangkan desa wisata, baik di

Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y. maupun desa lainnya.

F. Litelatur Review

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang dijadikan sebagai acuan. Adapun diantaranya sebagai berikut.

1. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Supryandi Tahun 2020 (Supryandi, 2020) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Lembaga Strategi Nasional sebagai NGO/LSM Dalam Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa. Penelitian ini berfokus pada kinerja Lembaga Strategi Nasional sebagai LSM dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Strategi Nasional sebagai NGO/LSM dengan menemukan problematika dalam kepemimpinan pemerintah desa dalam kurangnya memahami peraturan berkaitan desa. Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni berkaitan dengan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Strategi Nasional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Ada interaksi antara pemerintah desa dan non pemerintah dalam melakukan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang kinerja Lembaga Strategi Nasional secara keseluruhan, berbeda dengan rencana penelitian yang akan diteliti oleh

peneliti yang berfokus pada pendampingan Lembaga Strategi Nasional terhadap Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 Sukanti dkk dalam jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Vol. 2 (Sukanti et al., 2020) penelitiannya yang berjudul “Peran Pendampingan dalam Perencanaan dan Inventarisasi Sumber Daya Wisata untuk Mengembangkan Desa Wisata di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor” penelitian ini berfokus pada Pendampingan dalam Perencanaan dan Inventarisasi Sumber Daya Wisata untuk Mengembangkan Desa Wisata yang dilakukan oleh LPPM dan dosen mengabdikan dari IPB, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya inventarisasi potensi dalam rencana tata ruang desa sebelum perencanaan. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai konsep dan langkah-langkah dalam mengembangkan desa wisata. Adapun langkah awal yang diperlukan dalam mengembangkan desa wisata di Desa Sukawening adalah membangun pemahaman masyarakat desa dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan wisata desa dan inventarisasi potensi sumber daya di desa yang nantinya akan dikembangkan menjadi atraksi dari desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, memiliki korelasi dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti yakni menggambarkan langkah atau tahap awal dalam melakukan pendampingan pada desa wisata, interaksi pendamping desa dan

masyarakat bersama pemerintah desa menjadi hal dasar dalam membangun presektif yang sama untuk tindakan berikutnya.

3. Penelitian yang dilakukan di tahun 2013 oleh Heny, dkk dalam jurnal Kawistara Vol. 3, No. 2, Agustus 2013 (Geogra & Gadjah, 2013) yang berjudul “PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA JATILUWIH TABANAN, BALI” dalam penelitiannya berfokus mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat lokal. Dalam penelitian ini diuraikan bahwa pengembangan desa wisata berbasis partisipasi harusnya melibatkan partisipasi yang hakiki masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan hasil penelitian menemukan bahwa kehadiran warga dalam pertemuan desa cukup antusias, namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 40% warga mengaku jarang diundang dalam pertemuan di desa. Sebanyak 25% menyatakan tidak pernah diundang dalam pertemuan yang membahas pengembangan desa wisata. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Implementasi, keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implementasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat minim karena

partisipasi masyarakat luar yang memonopoli usaha berskala besar hal tersebut dikarenakan peluang usaha tersebut memerlukan modal besar, resiko bisnis yang tinggi, persaingan ketat, dan menuntut kompetensi yang tinggi. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Pengawasan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan desa wisata terlihat minim, karena perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah secara *top-down*. Korelasi penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah melihat usaha dari Pemerintah Desa dan pendamping desa mampu melibatkan masyarakat dalam mewujudkan desa wisata, artinya pemerintah desa tidak menggunakan tipologi desa yang semestinya, interaksi dijalankan secara otoriter, artinya hubungan pemerintah desa dan masyarakat tidak berjalan dengan baik, terjadi ketidakterbukaan diantaranya. Metode penelitian analisis deskriptif-kualitatif. Kelemahan dari penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara observasi non-partisipasi sehingga menyebabkan data yang diperoleh tidak mendalam.

4. Selanjutnya dalam penelitian Kharisma, dkk pada JURNAL TEKNIK ITS Vol. 7, No. 2, Tahun 2018 (Wisata et al., 2018) yang berjudul “Penentuan Tipologi Desa Wisata berdasarkan Kesamaan Karakteristik Komponen Pembentuk Desa Wisata di Kabupaten Ponorogo” tahun 2018. Penelitian ini berbicara pentingnya melakukan perumusan tipologi dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Ponorogo, perumusan tersebut dilakukan 3 tahap analisis, yaitu pertama identifikasi karakteristik

komponen pembentuk desa wisata Kabupaten Ponorogo menggunakan metode analisis diskriptif; kedua, analisis variabel dalam penentuan tipologi desa wisata dengan menggunakan metode analisis Delphi; ketiga, penentuan tipologi desa wisata Kabupaten Ponorogo berdasarkan kesamaan karakteristik komponen pembentuk desa wisata dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Skoring. Dengan demikian, maka akan diketahui potensi desa mana yang berpotensi tinggi yang akan dikembangkan. Korelasi penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah dalam tahapan awal sebelum melakukan perencanaan dilakukan pembacaan potensi wilayah terlebih dahulu, artinya pemerintah menginginkan wisata yang dikembangkan berdasarkan potensi desa yang dimiliki, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari tindakan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Bedanya penelitian ini dalam mengidentifikasi potensi wilayah dengan menggunakan metode AHP dan Skoring, serta lokasi dalam penelitian.

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sartika dkk di tahun 2018 dalam Human Falah Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018 (Adinugraha et al., 2018) dengan judul penelitian “Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia” penelitian ini membicarakan tentang sektor pariwisata yang memiliki kontribusi begitu signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan suatu daerah ataupun negara. Korelasi penelitian ini dengan topik dan judul yang akan diteliti oleh peneliti adalah melihat sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap daerah dalam

hal ini tidak terlepas dari terjalinnya hubungan pemerintah desa, pihak ketiga dan masyarakat sehingga terjadi suatu interaksi dalam membangun konsep desa wisata. Pembedanya dalam penelitian ini yakni fokus dan lokus dari penelitian. Penelitian ini implementasi pariwisatanya lebih pada nuansa religiusitas. Kelemahan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sehingga tidak cepat untuk diterima, dicerna dan dicermati.

6. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Saeful dkk dalam jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 2, Agustus Tahun 2020 (Hidayat, dkk 2020) yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CURUG KEMBAR DESA RAKSABAYA”. Penelitian ini berbicara tentang Peran pemerintah dalam pengembangan Objek Wisata Curug kembar yang sudah *on the track*, diwujudkan dalam penataan lokasi wisata dengan keragaman fasilitas dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan pelaksana. Serta membicarakan faktor pendukung sebagai daya dukung regulasi, sumber daya alam dan bantuan dari pemerintah. Keselarasan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah melihat bagaimana Pemerintah Desa mampu menata komunikasi dan interaksi di internal pemerintah serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
7. Kemudian penelitian di tahun 2018 oleh Akhmad Amirudin dalam *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 2, No. 1, November Tahun 2017

(Amirudin, 2018) dengan judul “INOVASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA DI KOTA BATU” penelitian ini membahas tentang usaha dari pemerintah Kota Baru dengan mengembangkan pendekatan baru dan mengoptimalkan peran kelembagaan desa dalam mengembangkan kebijakan pariwisata. Keselarasaan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi kelembagaan pemerintah desa dalam pengembangan potensi wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa inovasi perangkat desa dalam mengembangkan destinasi wisata baru yang berbasis masyarakat serta kolaborasi dengan pokdarwis telah memberikan bentuk baru dalam kebijakan pariwisata di Kota Batu, desa-desa wisata yang dikembangkan pada tingkat desa lebih berhasil memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta mampu melibatkan masyarakat secara massif. Perbedaan penelitian ini yakni fokus dan lokus penelitian, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian studi kasus dan analisis model interaktif.

8. Penelitian dari Ristarnado, dkk dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN : Vol 1, No 1, Juni tahun 2019 (Ristarnado et al., 2019) dengan judul “Strategi Pemerintah Desa dalam pengembangan Pariwisata”. Penelitian ini berbicara tentang strategi Pemerintah Desa Tanjung Alam dalam mengembangkan wisata Telaga Biru. Penelitian ini menghasilkan keterkaitan antar dimensi-dimensi strategi yakni; Tujuan, kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintah Desa termasuk ke

dalam strategi. Strategi yang digunakan dalam pengembangan wisatanya yaitu penyediaan sarana dan prasarana, rencana promosi, pembentukan pengurus tetap, koordinasi dengan pendukung pariwisata, dan pelaksanaan serta pelatihan pemandu wisata. Korelasi penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah melihat tindakan dari kelembagaan pemerintah desa dalam pengembangan wisatanya. Namun penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

9. Selanjutnya penelitian Istiyanti, dalam Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Januari 2020, Vol 2 (Istiyanti, 2020) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan pariwisata, dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sukawening Kecamatan Dramaga yang dilakukan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata di Desa Sukawening, terutama dalam aspek budaya (Sarapala yaitu panahan). Masyarakat Desa Sukawening sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dalam pengembangan wisata, setelah kegiatan berlangsung masyarakat dapat langsung mengaplikasikan hasil sosialisasi yang didapat seperti pada pengelolaan PAM Desa. Setelah kegiatan berlangsung, BUMDes Sukawening telah launching salah satu usaha terbarunya yaitu es tebu. Keselarasan dengan rencana penelitian yang akan

diteliti oleh peneliti yakni penelitian ini mengkaji berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang meliputi bentuk pemberdayaan masyarakat dan hasil pemberdayaan masyarakat yang diinginkan.

10. Dalam penelitian Kurniawati, dkk pada Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 54 No. 1 Januari 2018 (Kurniawati et al., 2018), dengan judul “PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA TULUNGREJO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU” pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah tersusunnya strategi yang digunakan dalam perencanaan dan pengembangan Desa Wisata Tulungrejo meliputi. 1) Diversifikasi produk wisata. 2) Memperluas jaringan promosi. 3) Peningkatan kualitas pelayanan fisik dan non-fisik. 4) Penerapan sadar wisata. 5) Edukasi peningkatan kualitas sumber daya manusia 6) Realisasi tugas dan tanggung jawab stakeholders. 7) Absensi dan dokumentasi kegiatan kelompok sadar wisata, terjadinya tindakan timbal balik dari interaksi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perencanaan wisata. Penelitian ini berfokus pada peran masyarakat dalam perencanaan wisata Tulungrejo, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni dalam pengembangan wisata Tulungrejo tidak melibatkan pendamping desa, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis eksploratif.

Dari beberapa literatur di atas yang peneliti jadikan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian memiliki korelasi dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adapun yang membedakan dari beberapa penelitian terdahulu adalah fokus dan lokus, metode serta penyajian dari penelitian-penelitian tersebut di atas. Pada penelitian ini, peneliti lebih tertarik untuk meneliti terkait interaksi antara pemerintah desa, masyarakat dan pendamping desa (LSN) dalam mengembangkan desa wisata di Kalurahan Kampung, dimana peneliti lebih mengulik pendampingan yang dilakukan oleh LSN dalam melibatkan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan sehingga mampu membaca kondisi strategis wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki desa Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk meningkatkan kesejahteraan baik masyarakat setempat.

G. Kerangka Konseptual

Di bagian kerangka konseptual ini, peneliti memaparkan tentang hubungan logis dari literatur review yang membingkai kerangka berpikir penelitian ini. Dengan demikian pembatasan konsep yang digunakan disesuaikan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu: pendampingan Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh Lembaga Strategi Nasional dalam konteks pengembangan desa wisata. Melalui pemaparan ini peneliti memfokuskan pada empat hal, yaitu: (1) Pemerintahan Desa; (2) Pendampingan Desa; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat dan (4) Desa Wisata). Berikut alur konsep pemikiran peneliti:

1. Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (3) menguraikan bahwa: “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Munculnya Undang-Undang tersebut, membuat kewenangan pemerintah desa menjadi semakin luas, kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut dikatakan oleh Samya (2013), dalam Sutoro Eko, bahwa Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran satu desa satu perencanaan, sebagai acuan seluruh program pembangunan di desa dan dijalankan secara konsisten; Sistem pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya; (Sutoro, 2014).

Kewenangan tersebut dapat direalisasikan pemerintah desa melalui program-program strategis desa yang sifatnya membangun desa. Dalam

melakukan pengelolaan pembangunan pemerintah desa mesti memfokuskan pada satu perencanaan, sehingga dapat dilakukan secara konsisten dan terarah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut kelompok-kelompok masyarakat termarginalkan mesti dilibatkan sebagai jalan bahwa pemerintah mampu melakukan suatu perencanaan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Demikianpun dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah disebutkan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. (Silahuddin, 2015).

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan berskala lokal desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa, yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa meliputi: sistem organisasi perangkat desa, sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa, pengelolaan tanah bengkok, pecatu,

pengelolaan tanah titisara, dan pengembangan peran masyarakat desa. Sehingga soal mendampingi desa dalam melakukan pembangunan pemerintah desa berkerja sama dengan masyarakat dalam membangun konsep dan gagasan menjadi desa mandiri, sehingga di didalamnya terjadi suatu interaksi antar pemerintah, masyarakat dan pihak lain sebagai pendamping desa yang didasarkan atas kewenangan dalam regulasi terkait. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam membangun desa, hal tersebut sebagai bentuk pilihan bagi pemerintah desa untuk membantu merealisasikan visi dan misi desa menuju desa mandiri.

Hakekatnya pemerintah desa sebagai aktor utama dalam melakukan pembaharuan desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan.

Menurut Rivai (Octavia, dkk, 2019: 59) dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1, Juni 2019 menyebutkan berbagai fungsi pemerintah desa sebagai berikut:

1. Instruktif berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat desa.
2. Konsultatif berkaitan dengan fungsi pemerintah desa sebagai lembaga yang menampung berbagai permasalahan masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan masyarakat desa.

3. Partisipasi berkaitan dengan wujud tanggung jawab pemerintah bersama-sama masyarakat untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan.
4. Delegasi berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa untuk dapat membagi tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan kepada sektor-sektor di bawahnya.
5. Pengendalian berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa untuk dapat memberikan fungsi kontrol dan aturan-aturan terkait aktivitas kehidupan masyarakat desa.

Fungsi pemerintah desa tersebut di atas menjadi landasan untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikannya. Kaitannya dengan pendampingan dimana pemerintah desa dapat mengeluarkan kebijakan tentang pendampingan yang di dalamnya tentu ada tahap-tahap yang menyelesaikan suatu keresahan bersama, sehingga mampu mewujudkan kepentingan Bersama yakni menuju desa mandiri.

Dengan demikian fungsi Pemerintah Desa berupa segala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu di dalam situasi sosial kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Karenanya dalam konteks *governance* yang didalamnya terkandung point penting tentang perbuatan pemerintah dalam upaya pembangunan wisata di Kalurahan Kampung, maka peran pemerintah desa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa melakukan pembuatan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atas persetujuan dari masyarakat desa dalam bentuk kesepakatan antara pemerintah

dengan penyelenggara desa, untuk selanjutnya diformalisasikan dalam peraturan desa.

Oleh karenanya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa mesti didasarkan atas asas-asas yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diantaranya; kepastian hukum; tata penyelenggara pemerintahan; tata kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman dan partisipatif. (Hidayat & Djadjuli, 2020) . Sehingga Pemerintah Desa mampu mengatur dan mengelola pembangunan tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Tata kelola adalah kaidah, aturan, susunan, atau sistem sebagai jalan yang harus ditempuh, untuk melakukan perbuatan, dalam hal ini perbuatan pemerintahan.

Demikian menurut (Fung, 2008; Michels, dkk, 2010; Tholen, 2015) bahwa tata kelola pemerintahan pada tingkat lokal dalam hal ini pemerintah desa berada pada model tata kelola menuntut partisipasi warga yang aktif, melalui keterlibatan langsung atau tidak langsung (Andhika, 2017). Jenis partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi buah pikiran, partisipasi keterampilan, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, dan partisipasi uang; (Hamidjoyo; dalam Mu'iz Raharjo,2021).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan mesti didasarkan atas asas yang telah dimiliki oleh desa. Karenanya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan lokal menjadi hal yang wajib dalam melibatkan partisipasi masyarakat baik pikiran, tenaga dan material untuk mendukung tercapainya tujuan bersama. Partisipasi ini harus disalurkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

desa yang dikomandoi oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa kini bukanlah aktor tunggal atau dominan dalam pemerintahan dengan berinteraksi dengan pihak non pemerintah.

Interaksi antara pemerintah dan kekuatan non pemerintah dalam proses pemerintahan Abidin dkk (Abidin et al, 2013:10) memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses interaksi pemerintahan. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi atau berkerjasama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Pendapat-pendapat tersebut di atas menjelaskan bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik mengalami permasalahan di luar kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. Kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumber daya dan finansial dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai atau dilakukan secara independen.

Diluar keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa dalam menangani permasalahan publik maka diperbolehkan pemerintah desa melibatkan pihak ketiga dalam membantu memecahkan persoalan, yang itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dengan catatan yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dalam membantu desa dalam mencapai tujuan desa.

2. Pendampingan Desa

Pendampingan masyarakat desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pada awalnya pendampingan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Dalam regulasi ini telah diatur sedemikian rupa, yaitu sebagai berikut:

Pendampingan masyarakat desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif;
3. Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan

4. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan desa, kerja sama desa, dan Kawasan perdesaan.

Pendampingan masyarakat desa dilakukan berdasarkan prinsip; terbuka, membantu, berjenjang, sesuai kebutuhan, dan kebudayaan dan kemandirian. Prinsip terbuka mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemandirian desa. Prinsip membantu artinya bahwa pendampingan masyarakat bersifat membantu desa tanpa menggantikan peran dan tanggung jawab pihak yang didampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berjenjang artinya pendampingan masyarakat desa diselenggarakan oleh lembaga dan pemerintah (desa) secara sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Prinsip sesuai kebutuhan mengandung arti pendampingan masyarakat desa diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan desa dan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip kebudayaan dan kemandirian artinya pendampingan masyarakat desa bertumpu pada prakarsa, kemampuan masyarakat dan perangkat desa, serta berupaya mengembangkan kebudayaan, menciptakan kemandirian serta menghilangkan ketergantungan.

Intisari Pendampingan Desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Fasilitasi yang dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta

seluruh aturan pelaksanaannya. Pendampingan Desa mesti dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas sehingga pendampingan bukanlah melakukan kontrol dan “mobilisasi partisipasi” tetapi pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses fasilitasi terhadap warga desa agar berdaya dalam memperkuat desanya sebagai komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri (*self-governing community*).

Dalam melakukan pendampingan masyarakat, pemerintah desa dapat dibantu oleh; tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan/ atau pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dipilih oleh desa dan ditetapkan oleh kepala desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. Pihak ketiga adalah masyarakat atau lembaga di luar pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tenaga pendampingan desa dengan kualifikasi dan kompetensinya mampu memfasilitasi, edukasi, mediasi, dan advokasi, dengan mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa sesuai kebutuhan desa. Pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Menteri, bahwasannya pemerintah

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pendampingan Masyarakat Desa dapat dibantu oleh: a. Tenaga Pendamping Profesional; b. KPMD; dan/atau c. Pihak Ketiga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan serta perusahaan. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019).

Pendampingan Desa yang dilakukan baik oleh Tenaga Pendamping Profesional; KPMD; dan/atau Pihak Ketiga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan serta perusahaan. Pendamping desa ikut mengambil peran yang sifatnya membantu dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan monitoring terhadap pembangunan desa, kemudian melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang telah termaktub dalam peraturan. Di samping itu juga membantu pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi di desa, dan mendayagunakan sumber daya alam serta teknologi tepat guna.

Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu lembaga atau organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang didirikan atas dasar

sukarela atau inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu serta berfokus pada tujuan kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana ketentuan yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (1) mengatakan organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi luar pemerintahan atau birokrasi, yang fungsinya membantu kinerja pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Peran lembaga swadaya masyarakat pada umumnya adalah sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 6 organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana yaitu; (a) Penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi. (b) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. (c) Penyaluran aspirasi masyarakat. (d) Pemberdayaan masyarakat. (e) Pemenuhan pelayanan sosial. (f) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (g) Pemeliharaan dan

pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Direktorat Pembinaan Masyarakat, fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu sebagai berikut : 1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Wahana mengembangkan keswadayaan masyarakat. 4. Wahana pembinaan dan pengetahuan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan masyarakat Saidi, 1995 :177 dalam Oktaria, 2015. Artinya Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi yang melakukan oposisi dan kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah yang mengesampingkan kepentingan bersama.

Adapun peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Gaffar 2004 dalam Ali, 2013) mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat akar rumput yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya;
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sebagai monitoring perbuatan pemerintah yang tidak sesuai

dengan aturan yang berlaku dengan tujuan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai organisasi non-pemerintah yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kemudian oleh (Ngalu, dkk, 2019) menemukan lima ciri peranan yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu;

1. Dapat menjangkau masyarakat miskin;
2. Dapat mendorong partisipasi yang lebih luas;
3. Tidak bersifat birokratis;
4. Mampu bereksperimen; dan
5. Biaya oprasional murah.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa salah satu misi dan peran utama LSM adalah memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan dan SDM masyarakat yang rendah bisa menjadi fokus dan lokus program kerja LSM. Sebagaimana fungsi dan tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat pada dasarnya adalah melayani pertumbuhan dan perkembangan prakarsa masyarakat melalui pendampingan untuk mempercepat proses transformasi sosial menuju paradigma masyarakat yang adil demokratis. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan keswadayaan, pembinaan dan *transfer* pengetahuan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Morris (dalam Ean, 2017), Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor *non-profit*. Ia melakukan teoritisasi

terhadap fenomena Lembaga Swadaya Masyarakat dengan mencirikan organisasi sektor *non-profit* sebagai berikut:

1. Terorganisir (*organized*); terinstitusionalisasi dari sudut bentuk organisasi dan sistem oprasinya.
2. Bukan negara (*private*); secara institusional bukan bagian dari negara atau pemerintah.
3. Tidak berorientasi profit (*non-profit distributing*); tidak berorientasi menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau para direktornya, tetapi mengembalikan pendapatannya untuk kepentingan misinya.
4. Swadaya (*slef- governing*); mempunyai sistem untuk mengatur dirinya sendiri.
5. Kesukarelaan (*voluntary*); melibatkan partisipasi sukarela dalam oprasi ataupun manajemen organisasi.

Artinya mereka (Lembaga Swadaya Masyarakat) berorientasi kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas sebagai basis dari masyarakat dan sebagai pengimbang bagi pemerintah. terdapat komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, sehingga terjadi pertukaran gagasan dan sumber daya yang memberikan potensi pada satu *front* yang sama.

Sinaga memetakan LSM dengan menggunakan beberapa sudut pandang salah satu diantaranya berdasarkan Tipe Peran LSM a. LSM yang berorientasi pada kesejahteraan. b. LSM yang berorientasi dan mobilisasi masyarakat pada pemberdayaan. c. LSM yang berorientasi pada payung atau jaringan kerja LSM. (dalam Ali, 2017) Ide dasar dari pembagian tersebut adalah keterlibatan dalam

pembangunan secara bersama, daripada menciptakan konflik sosial di antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan maupun kelas-kelas ekonomi yang berbeda.

Berdasarkan teori-teori dan argumen yang telah dikemukakan di atas maka, menurut peneliti tentang Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi non-pemerintahan yang didirikan atas dasar inisiatif dengan tujuan kemasyarakatan dengan membantu meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang basisnya tidak berdasarkan kepentingan masyarakat. Dengan melakukan penyaluran kegiatan, aspirasi, pembinaan, pemberdayaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan/pengembangan desa berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

4. Desa Wisata

Desa wisata di era kini tengah ramai diperbincangkan, sebab menjadi salah satu dari industri paling menjanjikan dengan *suport* inovasi terbaru. Desa wisata merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pariwisata, sejalan dengan dinamika yang berkembang, telah merambah diberbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development*, *village tourism* dan *ecotourism*, yang merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan (Sastrayuda GS, 2010, dalam Adi, 2018).

Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Lebih lanjut, Fatmawati dkk, (Fatmawati dkk, 2017) mendefinisikan desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor.

Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa kriteria dalam menentukan desa yang akan dijadikan desa wisata adalah memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, memiliki aksesibilitas, dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas wisata yang sudah ada dan terkenal. Berikut penjelasan terkait kriteria desa wisata.

1. Keberadaan/kedekatan dengan objek wisata yang sudah ada, (Sastrayuda GS, 2010 dalam Adi 2018) menjelaskan lebih lanjut bahwa desa wisata akan lebih baik jika sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan objek wisata. Hal tersebut akan mendukung kemudahan dalam melakukan pengembangan desa menjadi desa wisata.
2. Memiliki potensi wisata, Potensi desa yang dapat dijadikan sebagai objek wisata adalah potensi sumber daya alam, budaya, dan pertanian.
 - a. Potensi sumber daya alam

Sumber daya alam adalah daya tarik keseluruhan atau sebagian bentang alam berupa gunung, laut, sungai, dan sebagainya yang merupakan anugerah dari Tuhan

(Muntasib EKS, Rachmawati E, Mulyani YA, Sunkar A, 2014). Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan bahwa sebagian besar potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia terletak di wilayah pedesaan. Teguh dan Avenzora (2013) menjelaskan lebih lanjut bahwa pemanfaatan potensi alam dalam pengembangan desa wisata dapat membantu dalam upaya melestarikan dan menjaga keaslian serta keindahan alam yang dimiliki desa.

b. Potensi budaya

Kebudayaan tidak lepas dari kehidupan masyarakat, umumnya pada masyarakat pedesaan (Sastrayuda GS, 2010 dalam Adi, 2018). Kebudayaan dapat berupa sistem kehidupan masyarakat desa, kesenian tradisional, makanan khas, dan sebagainya yang terbentuk akibat dari perilaku kehidupan masyarakat yang sudah turun temurun.

c. Potensi pertanian

Masyarakat di wilayah pedesaan umumnya memiliki mata pencaharian disektor pertanian, hal ini menggambarkan bahwa lahan di wilayah pedesaan pada umumnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian (Teguh dan Avenzora, 2013). Masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat memiliki peran dalam menjaga dan melestarikan keunggulan dari produk wisata pedesaan. Keterbukaan masyarakat berkaitan dengan keinginan masyarakat dalam menerima desanya dijadikan desa wisata dan kesiapan berperan dalam desa wisata (Sastrayuda GS, 2010, dalam Adi, 2018). Aksesibilitas, Lokasi desa yang strategis akan mempermudah akses wisatawan menuju ke desa wisata.

Aksesibilitas berkaitan dengan kondisi jalan menuju desa dan kemudahan dalam menentukan transportasi yang akan digunakan (Yoeti 1991 dalam Atmoko, 2014).

Dalam mengembangkan desa wisata dapat dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki desa, diantaranya pada potensi sumber daya alam, pertanian, dan budaya. Potensi tersebut dapat dikembangkan berdasarkan kriteria keadaan/kedekatan objek wisata tersebut. Terdapat kriteria yang digunakan selain yang telah disebutkan yaitu keberadaan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah sosok atau seseorang yang dapat menjadi *trigger* untuk pengembangan desanya menjadi desa wisata.

Yoeti 1991 dalam Yusfida I., (2013) menjelaskan bahwa suatu objek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar objek tersebut diminati pengunjung, yaitu:

1. *Something to see* adalah objek wisata harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Objek wisata harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu menarik minat dari wisatawan untuk berkunjung.
2. *Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, dan sebagainya. Hal tersebut berupa fasilitas rekreasi seperti arena bermain atau tempat makan.
3. *Something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja. Pada umumnya adalah ciri khas daerah yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh.

Sehingga dalam pengembangan desa wisata dilihat dari nilai estetika sehingga menarik dan dapat mendatangkan wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek wisata tersebut, dengan begitu dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi masyarakat sekitar objek wisata.

(Raharjana DT, 2010, dalam Adi, 2018) menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata dilakukan dengan menerapkan pendekatan *community-based tourism*. Pendekatan tersebut melibat masyarakat sebagai pelaku utama dalam desa wisata, sedangkan keterlibatan pemerintah dan swasta sebatas memfasilitasi masyarakat. (Raharjana DT, 2010, dalam Adi, 2018) menjelaskan lebih lanjut pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan pendekatan pada tiga sisi pengembangan yaitu pada kelembagaan desa wisata, objek dan daya tarik wisata, dan sarana dan prasarana wisata.

1. Pengembangan kelembagaan desa wisata

Kelembagaan memiliki peranan dalam perencanaan awal untuk menentukan usulan program atau kegiatan desa wisata. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang desa wisata. Salah satunya adalah melalui program pelatihan pengembangan desa wisata seperti pelatihan bagi kelompok sadar wisata, pelatihan tata boga dan tata *homestay*, pembuatan cinderamata, dan pelatihan *guide* atau pemandu wisata termasuk didalamnya keterampilan menjadi instruktur *outbound*.

2. Pengembangan objek dan daya tarik wisata

Perencanaan awal untuk pengembangan objek dan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagai tuan rumah. Pengembangan tersebut dibuat agar mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki oleh desa.

3. Pengembangan sarana prasarana wisata

Perencanaan awal pengembangan sarana dan prasarana dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah diarahkan untuk pengembangan sarana prasarana wisata yang baru seperti alat-alat *outbound*, pembangunan gapura, gedung khusus pengelola desa wisata, cinderamata khas setempat, dan rumah makan bernuansa alami pedesaan.

Sebagaimana dijelaskan di oleh Raharjana bahwasanya dalam pengembangan desa wisata masyarakat dijadikan sebagai pelaku utama dalam desa wisata, sedangkan keterlibatan pemerintah dan swasta sebatas memfasilitasi masyarakat. Dilakukan dengan pendekatan pada tiga sisi pengembangan yaitu pada kelembagaan desa wisata, objek dan daya tarik wisata, dan sarana dan prasarana wisata.

Pengembangan Desa sebagai desa wisata dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa dipadukan dengan kebutuhan dan dukungan wisatawan. Pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh BUMDes bekerja sama dengan masyarakat Desa setempat. Beragam potensi yang dimiliki membuat desa-desa mulai merencanakan, menata dan memperindah kekayaan alam dalam hal ini potensi miliknya. Dengan demikian pentingnya suatu pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam proses pembangunan agar dalam upaya pembangunan tetap

berorientasi kepada kepentingan masyarakat setempat, lingkungan dan peletakan atau pembagian zonasi yang tepat dan penataan. Lanskap yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat.

Adapun pendekatan Raharjana (2010) dalam Adi 2018 menjelaskan lebih lanjut pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan pendekatan pada tiga sisi pengembangan yaitu pada kelembagaan desa wisata, objek dan daya tarik wisata, dan sarana dan prasarana wisata.

1. Pengembangan kelembagaan desa wisata, Kelembagaan memiliki peranan dalam perencanaan awal untuk menentukan usulan program atau kegiatan desa wisata. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang desa wisata. Salah satunya adalah melalui program pelatihan pengembangan desa wisata seperti pelatihan bagi kelompok sadar wisata, pelatihan tata boga dan tata *homestay*, pembuatan cinderamata, dan pelatihan *guide* atau pemandu wisata termasuk didalamnya keterampilan menjadi instruktur *outbound*.
2. Pengembangan objek dan daya tarik wisata, Perencanaan awal untuk pengembangan objek dan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagai tuan rumah. Pengembangan tersebut dibuat agar mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki oleh desa.
3. Pengembangan sarana prasarana wisata, Perencanaan awal pengembangan sarana dan prasarana dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah diarahkan untuk pengembangan sarana prasarana wisata yang baru seperti alat-alat *outbound*,

pembangunan gapura, gedung khusus pengelola desa wisata, cinderamata khas setempat, dan rumah makan bernuansa alami pedesaan.

Pengembangan Desa sebagai desa wisata dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa dipadukan dengan kebutuhan dan dukungan wisatawan. Pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh BUMDes Panyampa bekerja sama dengan masyarakat Desa setempat

Pentingnya suatu pendekatan dalam proses pengembangan desa wisata agar dalam upaya pembangunan tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat setempat, lingkungan dan peletakan/pembagian zonasi yang tepat dan penataan. Dengan lanskap yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat lokal merupakan tuan rumah yang wajib dilibatkan dalam pengembangan wisata, karenanya masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata secara keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Artinya dalam hal pengembangan desa wisata diperlukan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengembangan wisata perkembangan pariwisata berlangsung melalui 3 tahapan yaitu: Tahap Penemuan (*Discovery*), Tahap munculnya Tanggapan dan Inisiatif Lokal (*Local Response*), Tahap Institusionalisasi (*Institutionalized*) menurut Pujaastawa, 2019:23-25)

a. Tahap Penemuan (*Discovery*)

Pada tahap ini ide pengembangan menjadi Desa Wisata diawali dengan melihat sejumlah potensi yang dimiliki Desa untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

- b. Tahap munculnya tanggapan dan Inisiatif Lokal (*Local Response*) Pada tahap ini berkat penyampaian kepada masyarakat Desa mengenai potensi yang ditemukan oleh penemunya, kemudian masyarakat desa memberikan tanggapan positif dalam mendukung terbentuknya Desa menjadi Desa Wisata, kemudian masyarakat mengambil inisiatif untuk mau bekerja sama dalam membantu mewujudkan terbentuknya Desa Wisata.
- c. Tahap *Institusionalisasi Institusionalized*) Pasca dibentuknya daya tarik wisata di kawasan Desa Wisata, para wisatawan mulai datang untuk mengunjungi tempat tersebut. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan pihak pengelolaan pariwisata melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepariwisataan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Dengan demikian tahap-tahap pengembangan desa wisata ada tiga tahap yang dilakukan desa yakni Tahap Penemuan (*Discovery*), Tahap munculnya Tanggapan dan Inisiatif Lokal (*Local Response*), Tahap *Institusionalisasi (Institusionalized)*. Karenanya desa wisata merupakan usaha untuk memberdayakan masyarakat setempat, agar dapat berperan dalam upaya meningkatkan potensi ataupun lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing, dalam hal ini terkhusus Kalurahan Kampung.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sedang berlangsung dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dkk (Moleong, 2019:6) yang mendefinisikan, “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan pendampingan Pemerintah Desa oleh Lembaga Strategi Nasional dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Kampung.

b. Unit Analisis

Menurut Patten dkk (2018:71) berpendapat bahwa “*The unit of analysis is simply who or what constitutes one “unit” from which data has been collected in the study*” Unit analisis hanyalah siapa atau apa yang merupakan satu "unit" dari mana data telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan unit analisis adalah kesatuan dari unit pengumpulan data.

a) Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Ini, lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian adalah Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendampingan Pemerintah Desa oleh Lembaga Strategi Nasional dalam mengembangkan desa wisata di Kalurahan Kampung.

c) Subjek/Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan mengambil orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri spesifik yang dimiliki sampel itu. Purposive diartikan juga teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud pertimbangan tertentu itu seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan tema penelitian baik pemerintah desa, pendamping desa (LSN), Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat. Kriteria informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pendalaman isu atau informasi tertentu yang dapat ditemui di lapangan, berikut datanya.

Berikut data informan yang telah peneliti temui dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan persoalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Secara lebih rinci berikut deskripsi informan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data Informan

No.	Nama	Usia/Thn	Pekerjaan
1.	Suparna, SE.	51	Lurah Kampung
2.	Syarief Aryfaid, S.IP.	40	Direktur LSN
3.	Arif Budianto, ST	38	Carik Kampung
4.	Ahmad Fauzi Shabirin, S.IP.	24	Staf LSN
5.	Handono	23	Staf LSN
6.	Budi Winarso	54	Kaur Perencanaan
7.	Suroyo	53	Kasi Kesejahteraan
8.	Sumarlan	39	Dukuh Kaliwaru
9.	Sukastini	56	Dukuh Candi/Pamong Desa
10.	Triyatna	41	BPD
11.	Suroto	60	Masyarakat/Guru
12.	Tatik	36	Masyarakat/Kader KB

Sumber : Data Primer 2021

Subjek penelitian di atas dipilih karena berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informan sesuai dengan permasalahan penelitian. Di dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti, (Usman dkk, 2006) Dalam observasi penelitian peneliti mengamati secara langsung terkait pendampingan Pemerintah Desa yang

dilakukan oleh Lembaga Strategi Nasional dalam konteks pengembangan desa wisata di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Peneliti melakukan observasi sebanyak 8 kali, tiga hari dilakukan dengan *live in* di rumah warga, pertama peneliti menemui pemerintah desa untuk menyampaikan tujuan kedatangan, lalu berdiskusi terkait keperluan peneliti yang berkaitan dengan desa wisata, sehingga pemerintah desa memberikan petunjuk arah pemilihan narasumber yang telah ditentukan peneliti kriterianya.

Pendampingan tersebut yang mencakup pendampingan dalam pemetaan potensi desa, penyusunan regulasi desa, pemberdayaan masyarakat serta pendampingan dalam kerjasama desa dengan pihak lain. Dalam melakukan observasi peneliti, datang dan mengamati lokasi yang akan dibangun *Rest Area* Wisata di Kali Waru yang didampingi pemerintah desa, dan juga potensi miliki desa lainnya.

b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut informan. Wawancara yang dimaksudkan untuk mendapatkan data ditangan pertama (data primer) dan merupakan perlengkapan pengumpulan data lainnya, (Usman dkk, 2006).

Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang jelas dan mendalami mengenai pendampingan Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh Lembaga Strategi Nasional dalam konteks pengembangan

desa wisata di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, D. I. Y. Adapun hal-hal yang diwawancarai mencakup pemetaan potensi desa, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah, kerja sama pemerintah desa dengan pihak ketiga.

Wawancara dilakukan peneliti terlebih dahulu dengan pihak pemerintah desa untuk meminta izin untuk melakukan penelitian tentang pendampingan desa dalam pengembangan desa wisata. Karenanya Pemerintah Desa kemudian menunjukan pihak mana saja yang mengetahui dan terlibat dalam program desa tersebut. Wawancara dilakukan selama berkali-kali pertemuan dengan narasumber yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai, dan juga peneliti melakukan *live in* selama 4 hari bersama warga Kampung dan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid. Namun, penentuan narasumber untuk masyarakat peneliti mengambil dari masyarakat yang tinggal jauh dari kantor kalurahan untuk memastikan kesamaan informasi yang diterima oleh warga.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada Kalurahan Kampung yang berkaitan dengan yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung menggunakan data sekunder. (Usman dkk, 2006). Dokumen yang akan dikumpulkan dalam jenis, bentuk, dan sifat apapun informasi baik direkam, rekaman yang ditulis atau informasi berupa fakta dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Berdasarkan hal tersebut dokumen yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Profil Kalurahan Kampung
2. Profil Lembaga Strategi Nasional
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
4. Dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Kampung
5. Salinan Dokumen D.E.D dan *Masterplan* Rest Area Kaliwaru

d. Metode Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ini dilakukan dalam pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan perbandingan dengan berbagai cara dan waktu. Menurut Sugiyono (2016: 373) terdapat tiga macam triangulasi yaitu:

- 1) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu, juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasi sumber masih sama belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018, hlm. 337) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/Verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya, agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi terkait fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3. Metode Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan setelah dilakukannya reduksi data. Metode penyajian data yang disajikan oleh peneliti secara tekstual terutama bersifat naratif. (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2011;341.) untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada tahapan ini data-data yang telah diperoleh kemudian disusun lalu disajikan agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi terkait fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KAMPUNG

Pada bab ini peneliti akan memaparkan terkait deskripsi ataupun profil lokasi penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan pada dua institusi yang berbeda yakni di Pemerintah Kalurahan Kampung yang terletak pada Kapanewon Ngawen, Gunungkidul dan pada Lembaga Strategi Nasional, kota Yogyakarta, dimana keduanya akan peneliti uraikan satu-persatu sebagai berikut.

a. Kondisi Umum Kalurahan Kampung

Kalurahan Kampung merupakan salah satu desa di Kapanewon Ngawen Kabupaten Desa ini berbatasan dengan desa-desa lain diantaranya di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bendung, Kecamatan Semin, di sebelah barat Desa Natah, Kecamatan Nglipar, di sebelah utara Desa Jurangjero Kecamatan Ngawen dan disebelah selatan Desa Beji Kecamatan Ngawen. Kehidupan warga Kalurahan Kampung saling rukun dan saling menghormati.

Dalam rangka menelusuri sejarah berdirinya Kalurahan Kampung Kecamatan Ngawen sejak tahun 2018 telah dibentuk tim untuk menelusuri sejarah adeding Kalurahan Kampung, baik yang terungkap melalui fakta sejarah, penelitian, pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar, Dinas Kebudayaan serta daftar kepustakaan yang ada, akhirnya ditetapkan bahwa Kalurahan Kampung dengan Padukuhan Kampung Lor saat itu sebagai pusat pemerintahan lahir pada hari **Kemis Legi tanggal 19 Pebruari 1903** dan dikuatkan dengan Keputusan Kepala Kalurahan Kampung Nomor : 34/KPTS/2018 tentang penetapan hari, tanggal bulan dan tahun Hari Jadi Kalurahan Kampung yang ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa saat itu Bapak Sugito, SH, MH tanggal

19 Nopember 2018. Data Demang/Lurah/Kepala Kalurahan Kampung sejak berdiri sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2 Demang Kalurahan Kampung

No	Tahun	Nama	Keterangan
1.	1903 – 1955	Ponco Praboto	Demang
2.	1955 – 1984	Padmo Sunardjo	Demang/Lurah
3.	1985 – 1996	Priratoto	Lurah
4.	1997 – 2000	Hadi Purwanto	Kades
5.	2000 – 2002	Lasmadi	Pj. Kades
6.	2002 – 2012	Santosa	Kades
7.	2012 – 2018	Suparna	Kades
8.	2018 -	Sugito	Pj. Kades
9.	2018 – 2024	Suparna	Kades

Sumber : Dok. RPJMDes 2019-2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala desa yang paling lama menjabat menjadi pemimpin Kalurahan Kampung yaitu bapak Ponco Praboto dengan masa pemerintahannya mulai tahun 1903-1955 yakni 52 tahun. Pak Ponco menjadi kepala lurah legendaris karena masa kepemimpinannya yang lama, dengan istilah penamaan dari Lurah berganti menjadi Kepala Desa dan kini kembali lagi dengan sebutan lurah sesuai dengan nomenklatur PEMDA D.I.Y desa kini disebut kalurahan yang sampai sekarang telah mengalami 9 (Sembilan) kali pergantian Kepala Desa/Lurah dua diantaranya menjadi penanggungjawab sementara karena mengalami kekosongan kepemimpinan.

Sampai dengan kepala desa telah terganti hingga 9 kali, Pemerintah Kalurahan Kampung telah mengalami beberapa perubahan dalam bentuk pembangunan fisik seperti fasilitas-fasilitas umum; jalan, jembatan, tempat ibadah dan sebagainya. Di masa kepemimpinan lurah Suparna kini mencetuskan

pembangunan yang berorientasi pengembangan potensi desa, yang kemudian berkerja sama dengan Lembaga Strategi Nasional.

b. Pemerintah Kalurahan

Visi dan Misi Kalurahan

Agar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan Kampung dapat terlaksana dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis Kalurahan, yaitu dengan menyusun RPJM Desa Tahun 2021/2026 yang dijabarkan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kalurahan.

Visi dan Misi Kalurahan merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Kalurahan terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Kalurahan secara partisipatif. Adapun **Visi Kalurahan “Mewujudkan Kalurahan Kampung yang mampu meraih mimpi, dengan menggali, mengolah dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama yang tidak meninggalkan etika Pemerintah dan Tata Krama Jawa“**

Berkaitan dengan visi lurah Kampung tersebut, maka benar tekad dari masyarakat Kalurahan Kampung untuk senantiasa ingin mewujudkan Kalurahan Kampung menjadi desa yang mensejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut terlihat dari tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi desa melalui konsep desa wisata, untuk mendatangkan profit dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara rasional, efektif, efisien, dan

berwawasan lingkungan yang berkolaborasi dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan desa. Sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan, perekonomian masyarakat Kampung.

Untuk mencapai Visi Kalurahan Kampung, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan benar.
2. Meningkatkan sumber daya manusia.
3. Menggali, menata dan mengelola sumber daya alam.
4. Bersinergi dan membangun komunitas yang berkesinambungan, secara horisontal dan vertikal.
5. Peningkatan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian.
6. Mengembangkan sektor unggulan desa secara profesional.

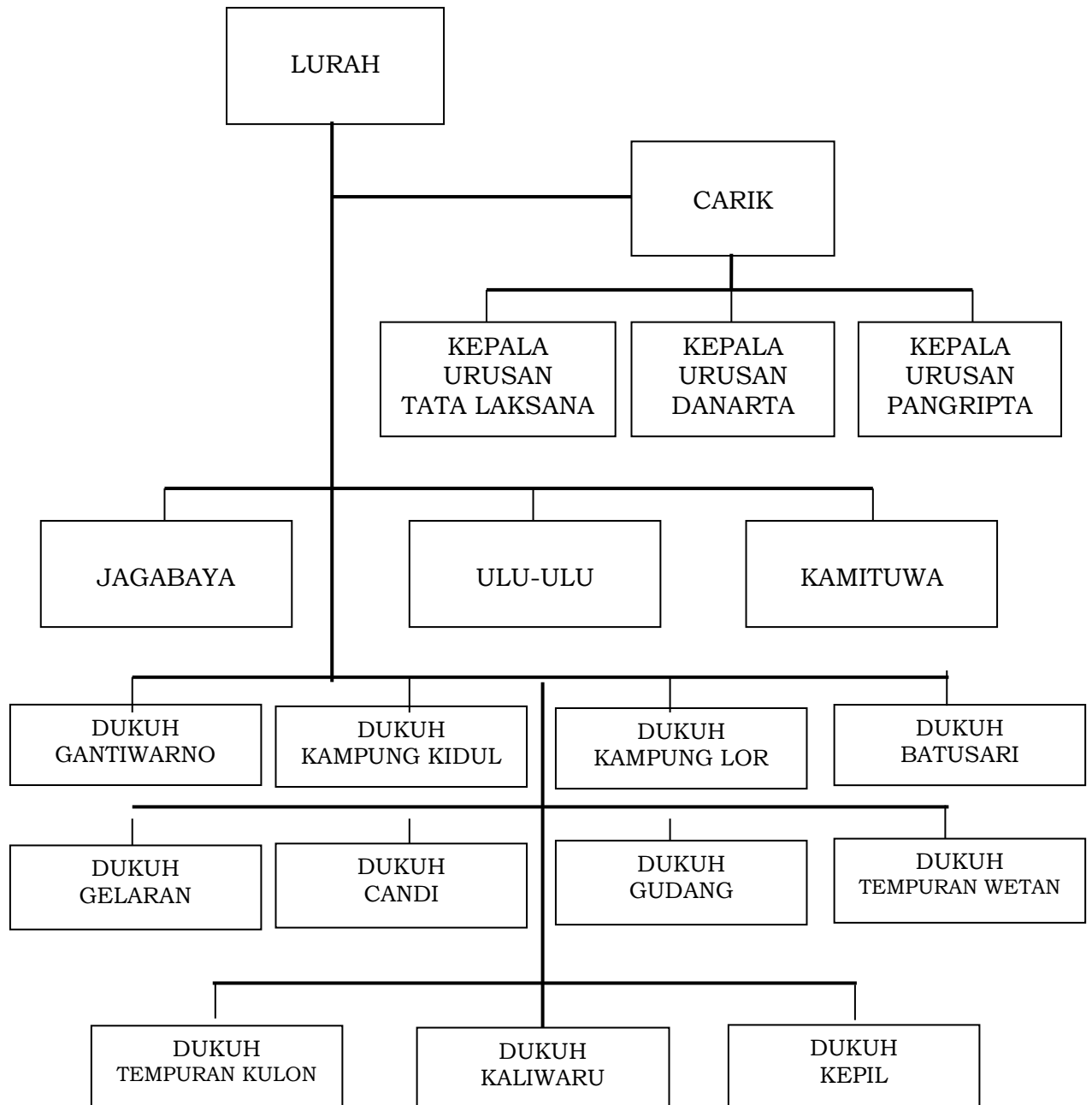
Misi tersebut adalah upaya Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan baik melalui sinergisme antar stakeholders pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan desa. Membangun SDA dan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di segala bidang sebagai pilar pokok pembangunan desa. Membangun konektivitas antar wilayah melalui peningkatan sarana prasarana dalam rangka percepatan pembangunan dan dukungan bagi pengembangan potensi disegala lini. Sehingga mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif.

Berdasarkan kondisi lapangan implementasi dari visi dan misi di atas belum sepenuhnya terwujud. Ada yang sudah terealisasi seperti akses jalan, jembatan, persediaan air bersih warga, tata pemerintahan yang lebih baik. Ada pula yang sedang dalam proses implementasi seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dari

sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan daya ungkit. Penerapan pemerintahan atas asas *good government* mampu dilakukan meski belum sepenuhnya.

Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 01 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kampung yang berpedoman pada Peraturan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kampung secara lengkap beserta data personil dari perangkat desa pada tabel di bawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG



Sumber : Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kalurahan Kampung

Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Kampung di atas merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di kalurahan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Terlihat dari tabel di atas, bahwa struktur pemerintah desa, dimana ada seorang kepala desa, sekretaris desa dan dibantu perangkat desa. Struktur perangkat menjadi 3 kaur, 3 kasi yang sekarang berganti nama dengan sebutan menjadi Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa serta diikuti 15 ketua padukuhan, yang juga mempunyai peran penting dalam proses berjalannya pemerintahan efektif dan efisien mengatur dan mengurus masyarakat dalam ranah yang lebih sempit dalam struktur organisasi desa.

Berdasarkan perannya masing-masing tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kalurahan yang berkaitan dengan pemerintahan kalurahan yang mengatur pemerintahan kalurahan, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

DATA PERSONIL PERANGKAT DESA

Tabel 3 Data Personil Perangkat Desa

No	Nama	Tempat, Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1	SUPARNA, SE	GK, 01-05-1970	S1	Kepala Desa	Candi, Kampung
2	ARIF BUDIANTO, ST	GK, 24-05-1983	S1	Sekretaris Desa	Jurangjero, Jurangjero
3	R.R YEKY F.P, ST	GK, 02-02-1983	S1	Kasi. Pemerintahan	Jambu, Jurangjero
4	SURAYA	GK, 24-02-1965	SLTA	Kasi. Pemberdayaan	Tempuran Wetan, Kampung
5	LANJAR RIYANTO, S.I. Pust	GK, 27-08-1979	S1	Kasi. Pelayanan	Gantiwarno, Kampung
6	SUTIKNA	GK, 25-04-1973	SLTA	Kaur. Keuangan	Kampung Lor, Kampung
7	BUDI WINARSO	GK, 30-06-1967	SLTA	Kaur. Perencanaan	Kampung Kidul, Kampung
8	M. IMAM UDIN	BREBES, 15-10-1972	SLTA	Kaur TU dan Umum	Pagerjurang, Kampung
9	SRIYONO	GK, 13-07-1971	SLTA	Dukuh Gantiwarno	Gantiwarno
10	JOKO SUSILO	GK, 28-09-1978	SLTA	Dukuh Kampung Kidul	Kampung Kidul
11	MUHAMMAD RIFAI	GK, 21-04-1993	SLTA	Dukuh Kampung Lor	Ngawen
12	HERI ARWANTA	GK, 06-01-1978	SLTA	Dukuh Batusari	Batusari
13	RISDIYANTO	GK, 10-08-1978	SLTA	Dukuh Pagerjurang	Pagerjurang
14	SUHARMI	GK, 09-11-1985	SLTA	Dukuh Gunung gambar	Gunung gambar
15	SUGIYANTO	GK, 10-07-1968	SLTP	Dukuh Suru	Suru
16	KARTINEM	GK, 10-06-1970	SLTA	Dukuh Ngawen	Ngawen
17	HERU SUBAGYO	GK, 29-09-1982	SLTA	Dukuh Gelaran	Gelaran
18	SUKASTINI	GK, 26-10-1966	SLTA	Dukuh Candi	Candi
19	WAGINA	GK, 21-08-1969	SLTP	Dukuh Gudang	Gudang
20	SARIYA	GK, 11-04-1968	SLTA	Dukuh Tempuran Wetan	Tempuran Wetan
21	SUKARDI	GK, 05-03-1980	SLTA	Dukuh Tempuran Kulon	Tempuran Kulon
22	SUMARLAN	GK, 06-04-1982	SLTA	Dukuh Kaliwaru	Kaliwaru
23	PURWANTO	GK, 14-06-1966	SLTA	Dukuh Kepil	Kepil
24	SUPRIYADI	GK, 07-08-1984	SLTA	Staf TU dan Umum	Kampung Kidul
25	SULASMI	GK, 05-05-1982	S1	Staf Keuangan	Kampung Lor

Sumber : Dok. RPJMDes 2019-2024

Pada data di atas terlihat bahwasanya dari seluruh perangkat desa terdapat empat keterwakilan perempuan di dalamnya, artinya keterlibatan perempuan masih minim di dalam tatanan pemerintah desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya minat perempuan untuk menjadi perangkat desa, selain itu ada sebagian dari mereka yang memilih Bertani dan berkebun, selebihnya bekerja di luar desa. Dari segi usia dan tingkat pendidikan yang beragam menjadikan seluruh perangkat desa saling berbagi dan betukar pikiran serta pengalaman dari masing-masing *background* yang dimiliki dalam membangun desa.

Dalam sebuah organisasi tentu menjadi hal yang wajar terjadi suatu perbedaan pandangan dalam menjalankan roda organisasi. Demikian yang terjadi di Kalurahan Kampung, perbedaan prespektif dalam membangun desa wisata ini kemudian menjadi sebuah *ruler* bagi desa dalam membangun desa yang lebih serius.

- **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan mitra kerja dari pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. BPD mempunyai kewenangan dalam membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut. Adapun daftar anggota BPD Kalurahan Kampung seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4 Daftar Anggota BPD

No	Nama	Jabatan	L/ P	Pendidikan Terakhir
1.	Drs. Sumanto	Ketua	L	S1
2.	Lasmadi	Wakil Ketua	L	SMA
3.	Sri Purwati, M. Pd. H	Sekretaris	P	S2
4.	Munajad	Kabid Penyelenggara Pemerintah Desa	L	SMA
5.	Sularno	Anggota	L	S
6.	Febri Lenggar Nugroho	Anggota	L	SMK
7.	Triyatno	Kabid Pembangunan Desa	L	S1
8.	Mijiyana	Anggota	L	SMA
9.	Sampan	Anggota	L	SMP

Sumber : RPJM Desa 2019-2024

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan tabel di atas terlihat adanya keterwakilan wilayah. Dimana keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Kampung terdiri dari sembilan orang. Pemilihan dilakukan dengan perwakilan dari jumlah padukuhan yang ada (15 Pedukuhan), pemilihan BPKal dilakukan secara demokratis dengan cara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kalurahan. BPD merupakan penyelenggara musyawarah kalurahan dalam melakukan revisi pada isi peraturan kalurahan tentang RPJM Desa, berdasarkan hasil kerjasama dengan pihak lain.

c. Aspek Geografis

a. Letak wilayah

Letak geografis Kalurahan Kampung merupakan kawasan yang unik memiliki daratan rendah, dataran tinggi, perbukitan, pegunungan dan lereng gunung. Kalurahan Kampung adalah daerah bagian utara di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi area pemukiman, dan pertanian warga, kemudian Kalurahan Kampung juga hutan, perbukitan maupun

pegunungan, berbeda dengan daerah selatan Kalurahan Kampung tidak memiliki daerah pantai. keindahan pantainya, perbukitan maupun pegunungan. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

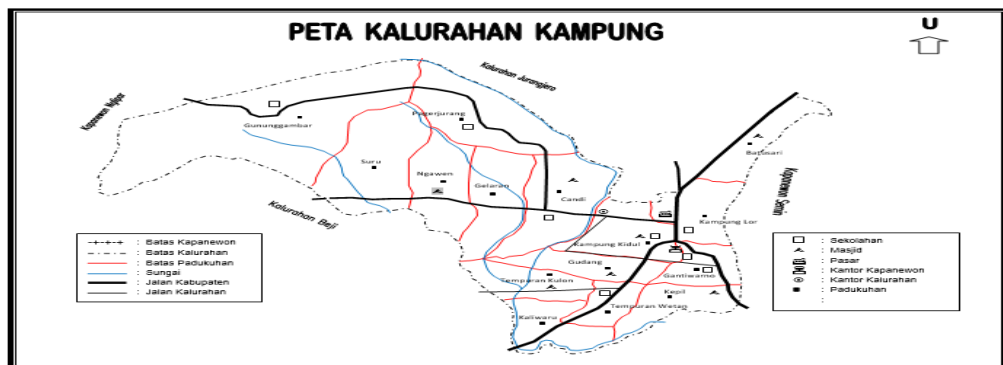
Tabel 5 Batas-Batas Wilayah

1.	Sebelah Utara	Desa Jurangjero
2.	Sebelah Selatan	Desa Beji
3.	Sebelah Barat	Desa Beji, Desa Natah (Kec. Nglipar)
4.	Sebelah Timur	Desa Bendung (Kec. Semin)

Sumber : RPJM Des 2019/2024

Batas wilayah tersebut merupakan informasi geospasial dasar yang penting dan berguna dalam pembangunan di Kalurahan Kampung. Batas-batas desa tersebut dimiliki masing-masing desa agar tidak menyebabkan kesalahpahaman diantara desa-desa/kalurahan lain sehingga menyebabkan konflik. Batas desa juga sebagai yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kalurahan Kampung yang menjadi kewenangannya dengan kalurahan lainnya.

Gambar 1 Peta wilayah Kalurahan Kampung terlampir



Sumber : Dok. RPJMDes 2019-2024

b. Luas wilayah

Kelurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas Wilayah ±

881.6119 Ha yang terbagi dengan penggunaan lahan beragam, berikut pada tabel di bawah ini penggunaan lahan di Kalurahan Kampung.

Tabel 6 Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Jumlah
	Tanah Sawah	293.7778 H
2.	Tanah Tegal/Ladang	299.1976 Ha
3.	Pemukiman	21.4646 Ha
4.	Perkarangan	211.5889 Ha

Sumber : Dok. RPJMDes 2019-2024

Bentuk penggunaan lahan sawah, tegal, pemukiman dan perkarangan tersebut benar digunakan sebagaimana sebenarnya. Penggunaan lahan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan di Kalurahan Kampung untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib tata ruang.

Topografi daratan rendah, perbukitan kondisi geografis suhu rata-rata harian 30 °C, curah hujan 1.244 Mm, dengan jumlah bulan Hujan empat (5) bulan. Tinggi tempat dari permukaan laut 650 Mdl. Tanah Erosi Ringan 70 Ha, Tanah Erosi Sedang 75 Ha, Dan Tanah Erosi Berat 50 Ha. Tingkat kemiringan tanah 40 °. Lahan Kritis 75 Ha.

Kondisi Kelurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan sebuah kalurahan yang terletak diantara perbatasan, adapun di sebelah utara Kalurahan Jurangjero, timur Kalurahan Bendung (Kec. Semin), selatan Kalurahan Beji dan barat Kalurahan Beji, Desa Natah (Kec. Nglipar). Gambar 1 Peta Wilayah Kalurahan Kampung. Dalam hal ini lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Kondisi Kalurahan Kampung masih sangat baik. Kalurahan Kampung terdiri atas 14 Dusun, 15 RW, dan 64

RT selama penelitian di lapangan terlihat hampir dari masing-masing wilayah memiliki potensi yang baik.

Adapun potensi yang dimiliki Kalurahan Kampung diantaranya dalam bidang pertanian, perkebunan, kesenian, kuliner dan kerajinan serta potensi alam yang tengah dikembangkan yakni *rest area* di kaliwaru yang selanjutnya akan dikembangkan pula potensi-potensi lainnya seperti gunung gambar, dan watu keren.

c. Orbitasi/jarak dari pusat-pusat pemerintahan

Secara geografis letak Kalurahan Kampung terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan terbilang jauh namun masih bisa dan mudah dijangkau, selengkapnya sebagai berikut :

- a. Jarak dari Pusat Kecamatan : 0,75 Km
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 25 Km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 64 Km

Keterangan jarak di atas merupakan gambaran terkait geografis Kalurahan Kampung. Akses sangat penting dalam menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah, jika melihat akses dari Kalurahan Kampung menuju ke pusat kota, aksesnya sangatlah mudah, dengan didukung kondisi jalan yang bagus dan memadai, jika dilihat jarak tempuh dari kalurahan menuju ke ibukota kecamatan, jaraknya 0,75 Km. dan juga jarak dari kalurahan ke ibukota kabupaten, jaraknya 25 Km. Jarak-jarak tersebut meskipun terbilang jauh masih dapat ditempuh kondisi jalanpun sudah bagus.

Secara umum kondisi tanah di Kalurahan Kampung ialah tanah tadah hujan yang subur. Wilayah Kalurahan Kampung dilintasi 1 sungai yaitu Kaliwaru. Persawahan masih cukup banyak, hingga hampir sebagian besar wilayahnya terhampar sawah baik sawah milik perorangan maupun kelompok. Dengan wilayah yang cukup luas Kalurahan Kampung memiliki luas tanah kas desa 483.312 Hektar.

Kalurahan Kampung memiliki daerah dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi/pegunungan serta lereng gunung. Kalurahan Kampung merupakan daerah bagian utara di Kabupaten Gunungkidul, sehingga tidak memiliki daerah pantai sebagaimana daerah selatan yang dikenal dengan daerah pantai. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk lahan pertanian/tanah lungguh, bangunan sekolahan, balai desa, balai padukuhan, kuburan, perkantoran pemerintahan, pertokohan dan lapangan serta fasilitas pasar. Ada pula tanah hutan yakni hutan adat dan hutan rakyat.

Jika dilihat dari posisi Kalurahan Kampung. Kalurahan Kampung merupakan desa yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah artinya Kalurahan Kampung memiliki tanah yang rata dan perbukitan dengan karakter wilayah desa seperti ini, maka Kalurahan Kampung mempunyai potensi yang sangat baik tentunya di bidang pertanian dan/atau perkebunan. Segala jenis pertanian dilakukan pada lahan-lahan yang ada, mulai dari sawah, kopi-kopian, kacang-kacangan, sampai sayur-sayuran. Kalurahan Kampung juga mempunyai dua iklim sama halnya desa-desa yang ada di Indonesia yaitu iklim kemarau dan

hujan. Iklim yang ada di Kalurahan Kampung juga menjadi peran pendukung bagi berlangsungnya pertanian yang ada di Kalurahan Kampung, dengan ini Kalurahan Kampung secara geografis dapat dikatakan sebagai desa yang pertaniannya subur.

d. Aspek Demografi

Masyarakat Kalurahan Kampung merupakan masyarakat *socio-cultural* yang terdiri dari berbagai agama, ras dan suku bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Kampung cukup memadai, terdapat sebuah Perpustakaan Desa, Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Tingkat Atas/Kejuruan.

Kependudukan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, sebab penduduk memberikan peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Dimana sumber daya dari penduduk apabila kualitasnya tinggi, maka untuk keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa sudah tidak diragukan lagi. Jumlah penduduk Kalurahan Kampung sebesar 6.742 Jiwa.

Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, tingkatan usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Data ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi kependudukan yang ada di Kalurahan Kampung, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

a. Data penduduk

- 1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.

Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	3.344	49,6
2.	Perempuan	3.398	50,4
Jumlah penduduk		6.742	100

Sumber : RPJMDes 2019-2024

Dengan Jumlah padukuhan yang terdiri dari 15 padukuhan yang ada di Kalurahan Kampung. Jenis kelamin merupakan salah satu kategori yang diperoleh manusia sejak lahir. Jenis kelamin juga merupakan salah satu unsur pembeda dalam diferensiasi sosial. Secara hakiki, perbedaan laki-laki dengan perempuan bersifat horizontal atau tidak menunjuk kan perbedaan derajat yang tinggi atau rendah sebab perbedaan tersebut hanya menyangkut bentuk dan sifat dasar.

Di berbagai bidang kehidupan, perbedaan jenis kelamin bukanlah halangan untuk melakukan suatu pekerjaan. Saat ini di Kalurahan Kampung data yang saya dapatkan banyak wanita yang menggeluti bidang pekerjaan yang dahulu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, meskipun ada beberapa pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh wanita. Contohnya, seperti bekerja menjadi tukang becak atau bekerja sebagai tukang bangunan yang handal digeluti oleh kaum laki-laki.

2) Jumlah pendudukan menurut usia

Data ini bermanfaat untuk mengetahui lajunya pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk berdasarkan usia yang ada di Kalurahan Kampung, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah (Jiwa)	Persentase%
1.	0-16	1.399	20,6
2.	17-33	1.662	24,5
3.	34-50	1.467	21,5
4.	51 ke atas	2.253	33,4
Jumlah penduduk			6.742

Sumber : Dok. RPJMdesa 2019-2024

Berdasarkan pada tabel di atas, Kalurahan Kampung mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, dapat dilihat dari jumlah penduduk yang produktif di Kalurahan Kampung dengan jumlah 46% Sedangkan penduduk yang bisa dikatakan belum dan sudah tidak produktif mempunyai persentase yang 54%. Dengan demikian usia yang belum dan sudah tidak produktif lebih banyak jumlahnya.

3) Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan

Kalurahan Kampung jika dilihat mempunyai lahan pertanian yang sangat luas dan juga dikatakan subur, hal ini tentu membuat sebagian besar masyarakat Kalurahan Kampung bermata-pencaharian sebagai besar disektor pertanian. Sektor pertanian juga mempunyai peranan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, berikut dapat dilihat data menurut jenis pekerjaan yang ada di Kalurahan Kampung:

Tabel 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Keterangan Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase%
1.	Belum Bekerja	1.292	19
2.	Mengurus Rumah Tangga	676	10
3.	Pelajar/Mahasiswa	1.016	15
4.	Pensiunan	59	1
5.	Pegawai Negeri Sipil	78	1
6.	TNI	2	0
7.	Perdagangan	41	1
8.	Petani/Pekebun	1.829	27
9.	Peternak	3	0
10.	Industri	3	0
11.	Karyawan Swasta	520	8
12.	Karyawan BUMN	3	0
13.	Karyawan Honorer	20	0
14.	Buruh Harian Lepas	493	7
15.	Buruh Tani/Perkebunan	107	2
16.	Pembantu Rumah Tangga	8	0
17.	Tukang Cukur	4	0
18.	Tukang Batu	8	0
19.	Tukang Kayu	19	0
20.	Tukang Jahit	4	0
21.	Penata Rias	2	0
22.	Mekanik	13	0
23.	Seniman	2	0
24.	Guru	18	0
25.	Bidan	3	0
26.	Perawat	3	0
27.	Sopir	35	1
28.	Pedagang	101	1
29.	Perangkat Desa	20	0
30.	Wiraswasta	391	6
Jumlah penduduk		6.742	100

Sumber : Dok. RPJMDes 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan berjumlah 5.489, dengan yang belum bekerja adalah sekitar 1.292 orang jika dihitung dari jumlah keseluruhan penduduk Kalurahan Kampung. Terlihat Mata pencaharian penduduk sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting

dalam bidang ekonomi masyarakat. Kemudian sebagai pemuda-pemudi sebagai pelajar/mahasiswa, lalu sebagai pekerja swasta dan buruh harian lepas ini merupakan masalah yang muncul di Kalurahan Kampung adalah banyaknya pemuda yang keluar dari Kalurahan Kampung untuk bekerja sebagai buruh harian lepas dan merantau diluar.

Adapula yang berprofesi sebagai polisi berjumlah 1 orang, apoteker 1 orang, transportasi 1 orang, sebagai karyawan BUMD 1 orang, sebagai buruh perikanan 1 orang, penata rambut 1 orang, sebagai imam masjid 1 orang dan sebagai dosen 1 orang. Kehidupan masyarakat Kalurahan Kampung, terutama yang telah memiliki pekerjaan dan menjalankan tugasnya sehari-hari, tidak lepas dari profesi atau kedudukan. Walau demikian perbedaan profesi akan berhubungan dengan perbedaan sumber dan besarnya pendapatan, sebagai hak yang harus diterima.

4) Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan

terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Berikut data tingkat pendidikan yang ada di Kalurahan Kampung pada tabel di bawah ini :

a. Lulusan Pendidikan Umum :

Tabel 10 Lulus Pendidikan Umum

No.	Keterangan Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase%
1.	Tidak Sekolah	2646	39
2.	Belum Tamat SD	932	14
3.	Tamat SD	733	11
4.	SLTP	1017	15
5.	SLTA	1229	18
6.	Diploma I/II	35	1
7.	Akademi/D III/S.Muda	55	1
8.	Diploma IV/Strata I	129	2
9.	Strata II	5	0
10.	Strata III	0	0

Sumber : Dok RPJMDes 2019-2024

Pendidikan merupakan salah satu pilar paling penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut harus juga diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik, sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Berdasarkan tabel yang tertera di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ada di Kalurahan Kampung

yakni SLTA/Sederajat sebesar 18%. Namun dapat dilihat bahwa memang penduduk Kalurahan Kampung banyak yang tidak atau belum sekolah dengan persentase 39%. Jika dibandingkan dengan penduduk berpendidikan atau yang sekolah baik tingkat SD/SLTP/SLTA/ sederajat maupun Pendidikan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan memang memiliki peran penting dalam meningkatkan ilmu dan pengetahuan masyarakat di Kalurahan Kampung. Kalurahan Kampung kini dengan lokasi sekolah yang cukup terjangkau, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas Pendidikan/sekolah.

Menurut pengamatan lapangan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena kesulitan ekonomi, kurangnya niat seseorang/individu untuk mengenyam pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil atau daerah tertinggal dan selain itu karena adanya faktor lingkungan (pergaulan).

e. Sarana Dan Prasarana Umum

Pembangunan masyarakat Kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalurahan menjadi lebih baik. Melalui pembangunan infrastruktur yang ditempuh, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dapat dicapai dan daya saing ekonomi nasional secara global dapat ditingkatkan. Sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan masyarakat, berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Kalurahan Kampung.

Tabel 11 Sarana dan Prasarana

No.	Nama Bangunan	Keterangan	Jumlah
1.	a. Kantor Desa	Permanen	1
2.	b. Prasarana Kesehatan		
	1. Puskesmas		1
	2. UKBM (posyandu/polindes)		15
	d. Sarana Prasarana Pendidikan		
	1. Perpustakaan Desa		1
	2. Gedung Sekolah PAUD		2
	3. Gedung Sekolah TK		4
	4. Gedung Sekolah SD		2
	5. Gedung Sekolah SMP		2
	6. Gedung SMA/SMK		3
	e. Sarana Prasarana Ibadah		
	1. Mesjid		15
	2. Mushola		9
	3. Pura		3
	f. Sarana Prasarana umum		
	1. Sarana Olahraga		3
	2. Kesenian dan budaya		1
	3. Balai Pertemuan		9
	4. Sumur Desa		6
	5. Pasar Desa		1
Jumlah		2.573	100

Sumber : Dok. RPJMDes 2019-2024

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas masyarakat maka diperlukan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kebutuhan. Pada daerah penelitian ini yang terdiri atas 15 padukuhan tentunya kebutuhan setiap padukuhan akan berbeda dan didasarkan pada tingkat kebutuhan. Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,

dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu Kalurahan Kampung juga memiliki keanekaragaman seni dan budaya baik tradisional maupun modern, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 Seni dan Budaya

No	Uraian	Jumlah
1	Karawitan	4
2	Campursari	5
3	Rebana/Terbangan	1
4	Orkes	1
5	Orkes Bambu	1
6	Seniman Dalang	1
7	Seniman Campursari	6
8	Sadranan	1
9	Grebeg	1
10	Jathilan/Reog	3
11	Hadroh	2
12	Rasulan	14
13	Sanggar Tari	2

Sumber : Dok. RPJMDes 2019-2024

Seni dan budaya merupakan modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalurahan Kampung memiliki karakter budaya khas sehingga dengan karakter tersebut kedepan Kalurahan Kampung diharapkan lebih maju, dan mampu menjalankan roda pembangunan. Dinamisasi budaya juga harus diimbangi dengan mental yang sehat serta fisik yang kuat, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut. Setidaknya terdapat keanekaragaman seni dan budaya baik modern maupun tradisional di Kalurahan Kampung yang perkembangannya tergambar, namun semenjak Covid-19 melanda kegiatan masyarakat Kampung

terhentikan sementara termasuk kegiatan seni dan budaya, dan kini kegiatan-kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan kembali.

Selain itu, terdapat potensi wisata hasil pemetaan yang dilakukan oleh tim Lembaga Strategi Nasional bersama tim dari Pemerintah Desa. lebih lanjut tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 13 Potensi Wisata

No.	Potensi Wisata	Letak	Keterangan
1.	Watu Keren	Pdh. Gelaran	Ada
2.	Gunung Gambar	Pdh. Gunung Gambar	Ada
3.	Watu Jail	Pdh. Ngawen	Ada
4.	Kebun Kopi Robusta	Pdh. Gunung Gambar	Ada
5.	Kali Waru	Pdh. Kali Waru	Ada
6.	Petilasan	Pdh. Gunung Gambar	Ada
7.	Goa Alami	Pdh. Gelaran	Ada
8.	Burung Alap-alap	Pdh. Gelaran	Ada
9.	Kerajinan tangan/anyaman	Kal. Kampung	Ada
10.	Kuliner	Kal. Kampung	Ada
11.	Kebudayaan dan Seni	Kal. Kampung	Ada
12.	Pertanian	Kal. Kampung	Ada

Sumber : Dok. RPJM Desa

Potensi wisata desa tersebut di atas merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh tim LSN dan tim Pemerintah Desa. Potensi tersebut digali dari beberapa wilayah padukuhan yang ada di Kalurahan Kampung. Potensi yang ada dipetakan berdasarkan potensi alam, potensi buatan, potensi kebudayaan dan seni, dimana potensi yang ada masuk pada kategori potensi pariwisata, ketahanan pangan dan UMKM. Maka dari itu, potensi tersebut dapat mendukung Pemerintah Kalurahan Kampung untuk memperoleh sumber dana. Berdasarkan prioritas pemulihan ekonomi saat ini adalah pariwisata, ketahanan pangan dan UMKM.

f. Kondisi Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Kampung sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian. Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pungutab Desa bahwa Sumber Pendapatan Kalurahan meliputi :

1. Sumber Pendapatan Kalurahan

- a. Dana Desa
- b. Alokasi Dana Desa
- c. Pendapatan asli Kalurahan terdiri dari hasil kekayaan Kalurahan, dan lain-lain pendapatan asli Kalurahan yang sah;
- d. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap kalurahan secara proporsional;
- e. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk kalurahan paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- f. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang disalurkan melalui kas Kalurahan;
3. Sumber Pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun kekayaan kalurahan terdiri dari; tanah kas kalurahan, bangunan kalurahan yang dikelola kalurahan, serta lain-lain kekayaan milik kalurahan.

g. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kalurahan Kampung bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat Kalurahan Kampung mengandalkan lahan pertanian dan perkebunan untuk melakukan kegiatan bertani dan memanen hasil pertanian mereka dan masalah yang sering muncul yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan penguatan modal dan fasilitas sebagai modal untuk pembangunan khususnya di ekonomi produktif.

Jumlah Penduduk Miskin 1.935 orang /726 KK Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Kampung yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Kampung harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Tingginya tingkat angka kemiskinan tersebut memicu pemerintah dan warga kampung untuk melakukan gebrakan baru melalui pembangunan desa wisata atas potensi wilayah yang dimiliki. Selain itu adanya organisasi lembaga masyarakat di Kalurahan Kampung tentu

merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat, berikut merupakan lembaga-lembaga sosial yang ada di Kalurahan Kampung.

1. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) :

LPMD adalah lembaga mitra strategis di luar pemerintahan desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat desayang juga ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Jumlah pengurus 10 orang, jumlah anggota 9 orang

2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

PKK merupakan arena bagi perempuan untuk mengaktualisasi dirinya. Melalui kelompok ini perempuan didorong untuk mengekspresikan kemampuannya memimpin sebuah organisasi, menjalin relasi dengan sesama anggota atau diluar anggota, bertukar ide serta berupaya mensukseskan tujuan-tujuan yang telah disepakati. Dengan jumlah pengurus 7 Orang, anggota 22 Orang.

3. Karang Taruna Tunas Muda

Karang Taruna Tunas Muda merupakan organisasi sosial kepemudaan yang hadir sebagai wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan mendayagunakan semua potensi yang ada. Di Kalurahan Kampung. Dengan jumlah pengurus 7 Orang, anggota, 2 Orang, jenis kegiatan ; Olah raga, seni dan budaya

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kalurahan Kampung juga memiliki Badan Usahanya sendiri. Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Kalurahan Kampung, dengan nama BUMDes bangkit Karya Mandiri yang keberadaannya baru saja resmi dibentuk oleh Kalurahan dan masyarakat Kampung pada bulan November 2021, yang nantinya akan mengurus dan mengelola unit usaha lewat sumber daya yang dimiliki dalam lingkup Kalurahan Kampung.

f. Lembaga Strategi Nasional

CV. Lembaga Strategi Nasional adalah lembaga bisnis yang didirikan untuk mendukung dan membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta sebagai mitra kerja (penyedia jasa) diberbagai bidang antara lain: penelitian, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM, tatakelola organisasi pemerintah/swasta, pengembangan teknologi informasi, tatakelola lingkungan, serta jasa perdagangan umum.

Lembaga Bisnis dan Pemberdayaan semua unit usaha dikelola dan dijalankan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Demikian halnya dalam kemitraan yang dijalankan secara bertanggungjawab sesuai koridor hukum dan tata aturan yang berlaku, serta mengedepankan asas, akuntabilitas, integritas, transparansi, keadilan dan demokrasi. Lembaga Strategi Nasional yang melakukan berkaitan dengan inisiasi kebijakan dan advokasi kebijakan pemerintah, pemerintah daerah,

pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Membangun Indonesia bagian dari semangat Lembaga Strategi Nasional dengan bermitra dengan pemerintah desa dalam melakukan pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan suatu desa yang bertujuan mengembangkan desa wisata.

Inisiasi/ide dan Gagasan Lembaga Strategi Nasional dilakukan berdasarkan kapasitas serta aturan yang berlaku untuk mengetahui kondisi strategis setempat. Beberapa ide dan gagasan yang telah diberikan dapat digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan berbagai kelompok kepentingan. Misalnya pembaharuan desa dalam peta jalan gerakan desa membangun Indonesia, jalan SKPD berdesa, gagasan jejaring kemitraan pengusaha desa, peta jalan pembangunan dan pengembangan BUMDesa, gagasan jejaring kemitraan pengusaha bangun desa, Desa wisata, lumbung pangan, Desa nelayan, Desa agro industry, Integrasi dan zonasi kawasan pembangunan daerah dan desa, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah dan desa shareholder BUMD dan BUMDes.

g. Pengalaman Pekerjaan Dan Pendampingan Sejenis

Berikut beberapa pengalaman Lembaga Strategi Nasional yang telah atau sedang dilakukan sampai dengan tahun 2021 pendampingan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48.
- Amirudin, A. (2018). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p26-32>
- Andhika, L. R. (2017). EVOLUSI KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH: SOUND GOVERNANCE, DYNAMIC GOVERNANCE dan OPEN GOVERNMENT. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867>
- Fatmawati EN, Satiti EN, W. H. (2017). Pengembangan Potensi Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten. *Jurnal Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta*.
- Gaffar. (2000). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat*.
- Geogra, F., & Gadjah, À. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- George Junus Aditjondro. (2002). *Lembaga Swadaya Masyarakat -Gerakan Oposisi*.
- Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). Peran Lembaga Strategi Nasional Sebagai Ngo/Lsm Dalam Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Lsn Yogyakarta). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam

Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 277–293.

Husaini Usman dan Purnomo S.A. (2006). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.

Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), 53–62.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. R. I. (2019). *Permendes PDDT no 18. 53(9), 1–30.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150754/permendes-pdtt-no-18-tahun-2019>

kadesa.id/id_ID/wiki/policy-brief-pemberdayaan-bpd-untuk-penguatan-demokrasi-desa/

Kurniawati, E., Hamid, D., & Hakim, L. (2018). Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 54(1), 8–14.

M.M Billah. (1990). *Komunitas Lembaga Swadaya*.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono. (n.d.). *Metode Penyajian Data*. 2011, 341.

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhamad Mu'iz Raharjo. (2021). (Y. Hayati (ed.)).

Muntasib EKS, Rachmawati E, Mulyani YA, Sunkar A, R. M. (2014). *Interpretasi Alam*. Bogo. Pr.

Octavia, E., & Harmento, B. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Disiplin*

- Perangkat Desa Senakin Kabupaten Landak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i1.1097>
- Peraturan Menteri Desa, P. D. T. dan T. (2015). *Pendamping Desa*. 1–10.
- Raharjana DT. (2010). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. *Jurnal Kawistara*, 3.
- Ristarnado, R., Settyoko, J., & Harpinsyah, H. (2019). Strategi pemerintahan desa dalam mengembangkan pariwisata. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 40–51. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.4>
- Rosyid, M. (2015). *Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan*.
- Sastrayuda GS. (2010). *Konsep Pengembangan Desa Wisata Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure*.
- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan desa dan Regulasi Desa*.
- Sukanti, E. M., Harini, E. K. S., & Mulya, S. P. (2020). Peran Pendampingan dalam Perencanaan dan Inventarisasi Sumber Daya Wisata untuk Mengembangkan Desa Wisata di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(2), 153–162.
- Sumpeno. (2004). Kaji Tindak Pemberdayaan Petani di Daerah Tertinggal. *Jurnal Pemberdayaan*, 1, 8–16.
- Sutoro, E. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta
- Tricanto. (2000). *Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat, Intervensi Komunitas*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).

Wisata, D., Kharisma, M., Umilia, E., Perencanaan, D., Arsitektur, F., & Perencanaan, D. (2018). *Penentuan Tipologi Desa Wisata berdasarkan*. 7(2).

Yusfida I. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wisatawan Mancanegara Berwisata ke 15 Destinasi Pariwisata Indonesia*.